

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

Analysis of DKI Jakarta Provincial Government Financial Statements Before and During the Pandemic COVID-19

Rauni Duha Rambe¹⁾, Diah Armeliza²⁾, Dwi Handarini³⁾
Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email: rauniduha13@gmail.com	No. Telp: 085780777869	
Submitted: 14 July 2024	Accepted: 23 July 2024	Published: 24 July 2024

ABSTRACT

Adanya pandemi COVID-19 membuat Pemerintah daerah kesulitan untuk mengelola dan mengungkapkan keuangannya secara akuntabel. Analisis laporan keuangan adalah sebagai alat dalam menganalisis data keuangan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan, serta memprediksi kinerja keuangan di masa depan. Provinsi DKI Jakarta juga diperkirakan akan merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Penelitian ini akan mengkaji dan membandingkan kondisi keuangan Provinsi DKI Jakarta dari tahun anggaran 2018 hingga 2021. Metode kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi analisis aset dengan tren pertumbuhan aset, analisis kewajiban, analisis pendapatan, dan analisis belanja dengan rasio keuangan seperti rasio kemandirian PAD, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan PAD, rasio utang terhadap ekuitas, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan Debt to Income Ratio (DIR). Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mampu mempertahankan keuangan utama yang dibuktikan dengan tren pertumbuhan aset yang tetap naik walaupun pada masa pandemi COVID-19, analisis kewajiban yang sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman pada pihak eksternal, analisis pendapatan sudah dalam kondisi yang mandiri dalam pendapatan asli daerah memiliki pola delegatif. Adapun efisiensi PAD dan efisiensi belanja belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam kinerja sebelum maupun selama pandemic COVID-19

Kata kunci: laporan keuangan pemerintah daerah; analisis aset; kewajiban; pendapatan; belanja.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah arah dunia dan memicu reaksi luar biasa dari semua lapisan masyarakat. Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan yang melampaui masalah kesehatan dan berdampak signifikan yang melampaui masalah kesehatan dan berdampak signifikan pada aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia (Pakpahan, 2020). Ancaman risiko bencana ekonomi global memiliki potensi untuk mempengaruhi ekonomi Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat di dunia dan memiliki wilayah yang mencakup lebih dari lima juta kilometer persegi. Khususnya, dampak pandemic ini akan bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, tergantung pada potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai kontributor utama terhadap perekonomian Indonesia, mengalami tantangan besar selama pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan global dan nasional. Tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun, pada tahun 2019 ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Puncaknya tahun 2020, pandemic COVID-19 mengguncang ekonomi dengan penurunan drastic dalam aktivitas ekonomi, seperti penjualan sektor pariwisata, ritel, dan sektor jasa lainnya. Namun, tahun 2021 memberikan harapan akan pemulihan ekonomi dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi dan kebijakan stimulus pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama pandemi COVID-19. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah instrumen penting yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Penelitian ini akan fokus pada komponen utama laporan keuangan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja. Teknik analisis rasio keuangan akan digunakan untuk evaluasi kinerja dan perbandingan data dari tahun ke tahun.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak pandemic COVID-19 pada kondisi keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 pada tahun anggaran 2018-2021. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2023-selesai.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kuantitatif, di mana pendekatan ini akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik data pada titik waktu tertentu guna menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui situs web ppid.jakarta.go.id dan Jakarta.bpk.go.id, yang mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan hasil perhitungan dari pertumbuhan aset, rasio utang terhadap ekuitas, rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*), rasio DIR (*Debt to Income Ratio*), rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi belanja yang hasilnya akan digunakan untuk mengukur kinerja keuanagan pemrov DKI Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga pendekatan dalam pengumpulan data, yaitu:

- 1) Data sekunder (*secondary data*)
- 2) Data survei atau data primer (*survey data atau primary data*), dan
- 3) Data eksperimen (*experimental data*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yang melibatkan pengambilan data sekunder dengan cara mengamati dan mempelajari laporan keuangan yang tersedia di instansi yang sedang diselidiki. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain dengan tujuan yang lebih luar dari sekadar membantu dalam membantu dalam menemukan solusi masalah. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumentasi dokumen pendukung berupa LKPD dan LRA Pemrov DKI Jakarta tahun 2018-2021 yang telah dipublikasikan.

Hasil Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode atau proses yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi, sehingga data tersebut memenuhi kriteria yang memudahkan pemahaman dan bermanfaat dalam menemukan solusi untuk masalah yang terutama terkait dengan penelitian. Berikut merupakan indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Keuangan Daerah

Penelitian menggunakan Sembilan rasio dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:

a. Pertumbuhan aset,

Menurut (Kawatu, 2019), tujuan perbandingan nilai setiap jenis aset dalam neraca adalah untuk mengidentifikasi perubahan posisi aset pemerintah daerah antara dua periode berurutan. Peningkatan nilai aset mengindikasikan kemajuan atau pertumbuhan dalam aset pemerintah, sementara penurunan nilai aset menunjukkan adanya kemunduran, penurunan nilai aset, dan kurang efisien dalam pengelolaan aset.

Analisis pertumbuhan aset dalam neraca meliputi evaluasi pertumbuhan aset lancar, pertumbuhan investasi jangka panjang, pertumbuhan aset tetap, pertumbuhan adana cadangan, serta pertumbuhan aset lainnya.

Rumus pertumbuhan aset sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total aset}_{X_n} - \text{Total aset}_{(X_{n-1})}}{\text{Total aset}_{(X_{n-1})}} \times 100\%$$

Kondisi pertumbuhan aset mengalami pertumbuhan secara positif atau kah negative.

b. Rasio utang terhadap ekuitas,

Rasio ini digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar bagian dari ekuitas yang digunakan untuk mendanai utang (Kawatu, 2019). Jika hasil perhitungannya menghasilkan rasio yang tinggi, itu menunjukkan adanya risiko finansial dalam pemerintah daerah karena bergantung pada utangnya sebagai sumber pembiayaan yang signifikan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin sehat keadaan finansial pemerintah daerah.

Rumus rasio terhadap ekuitas:

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Sumber (Kawatu, 2019).

c. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*),

Rasio DSCR adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah, penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, pendapatan dari sumber daya alam, dan penerimaan lainnya yang berasal dengan jumlah utang pokok, bunga, serta biaya pinjaman lainnya setelah dikurangi pengeluaran wajib. Terhadap jumlah total utang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya. DSCR sangat penting jika pemerintah kota bermaksud untuk mengambil utang jangka Panjang.

Rasio ini dihitung:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Utang + Bunga + Biaya Lain)}} \times 100\%$$

Keterangan :

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BD : Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak
- DAU : Dana Alokasi Umum
- BW : Belanja Wajib (Belanja Pegawai dan belanja anggota DPRD)

Apabila DSCR memiliki nilai kurang dari 1, hal ini mengindikasikan terjadinya defisit arus kas, yang mengartikan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menutup semua kewajiban utang, termasuk pembayaran pokok dan bunga.

d. Rasio DIR (*Debt to Income Ratio*),

Rasio ini memberikan informasi mengenai kinerja pinjaman daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu membayar utang mereka kepada kreditur, yaitu pihak eksternal. Rumus untuk rasio utang terhadap pendapatan:

$$\text{Rasio Debt Income Ratio} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Kriteria:

- <10% **Sangat Baik**
- 10% - 20% **Cukup Baik**
- 20% - 40% **Baik**
- >40% **Kurang Baik**

(Mahmudi, 2016; 126)

e. Rasio efektivitas,

Rasio efektivitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini memberikan wawasan tentang sejauh mana pemerintah daerah dapat merencanakan dan mencapai target anggaran PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio antara PAD yang terealisasi dan target anggaran, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah rasio antara PAD yang terealisasi dan target anggaran, maka semakin kurang efisien pengelolaan keuangan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas suatu daerah adalah sebagai berikut (Abdul Halim: 2007):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif



Sumber: Mahmudi (2019)

f. Rasio efisiensi,

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat produktivitas yang tercapai dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan PAD dengan jumlah uang yang berhasil diperoleh dari PAD. Besar atau kecilnya nilai yang diperoleh dari ini mencerminkan seberapa efisien proses pengumpulan PAD tersebut. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin efektif kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dan menghasilkan pendapatan yang memadai, dan sebaliknya.

Perhitungan rasio efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Rasio Efisiensi: Rasio efisiensi pendapatan asli daerah.
- Biaya pemungutan PAD: Kontribusi lokal untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. contohnya, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Retribusi Pelayanan Umum.
- Realisasi Penerimaan PAD: Hasil penerimaan yang sudah terjadi dan didapat oleh pemerintah daerah.

Kriteria Penilaian Efisiensi dapat dikelompokkan menjadi standar sebagai berikut:

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber : Mahmudi (2019)

g. Rasio Kemandirian Daerah,

(Mahmudi, 2016) juga mengungkapkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pembiayaan dari pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, terutama yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169)

h. Rasio pertumbuhan pendapatan,

Tingkat pertumbuhan merupakan rasio yang mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dari waktu ke waktu. Setiap komponen yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan potensi mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. (Mahmudi, 2016) rasio ini digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan suatu daerah dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu bagian pendapatan. Berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung rasio tersebut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD (Xn)} - \text{Realisasi PAD (Xn - 1)}}{\text{Realisasi PAD (Xn - 1)}} \times 100\%$$

i. Rasio efisiensi belanja.

Rasio efisiensi belanja adalah perbandingan antara jumlah belanja yang telah direalisasikan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rasio ini berguna untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat menghemat anggaran yang telah dialokasikan. Jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola anggaran secara efisien. Sebaliknya, jika rasio tersebut melebihi 100%, itu menunjukkan adanya pemborosan anggaran (Kawatu, 2019). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

1) Analisis Kondisi Aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan tren pertumbuhan aset

Tabel 4.4 Tren Pertumbuhan Aset

Tahun	Total aset (Dalam Rupiah Penuh)	Tren Pertumbuhan aset %	Rp
2017	464.601.747.133.156		

2018	492.902.439.208.040	6%	28.300.692.074.884
2019	517.155.089.689.488	5%	24.252.650.481.448
2020	520.360.899.906.272	1%	3.205.810.216.784
2021	544.504.580.984.676	5%	24.143.681.078.404

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
(Diolah oleh peneliti)

Kondisi Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum pandemi sudah dikatakan mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan di Tahun 2017-2018 sebesar Rp28.300.692.074.884 dengan mengurangi total aset di tahun 2018 sebesar Rp492.902.439.208.040 dan juga pada tahun 2017 yang memiliki total aset sebesar Rp464.601.747.133.156 selanjutnya hasil dari perhitungan selisih tahun 2018 dan 2017 dibagi dengan total aset pada tahun 2017 dan mendapatkan hasil kenaikan pertumbuhan sebesar 6% dari tahun 2017 s.d tahun 2018.

Kondisi aset pada tahun 2019 mengalami kenaikan juga tetapi belum mencapai pertumbuhan yang sama di tahun 2018. Pertumbuhan aset di tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 5% dengan total selisih aset pada tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp24.252.650.481.448. dikarenakan pos aset lancar menurun secara signifikan yang berfokus pada Kas Daerah, Potongan Pajak, dan Jamsostek yang belum disetorkan kepada Pemerintah dan tergolong sebagai kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD, dan Kas dari Jaminan Bank Garansi.

Tabel 4.5 Tren Pertumbuhan Aset Tetap

Keterangan Aset Tetap	Tahun Neraca		Dalam Rupiah Penuh	
	2017	2018	Selisih	%
Tanah	298.499.135.884.947	324.292.891.946.299	25.793.756.061.352	9%
Peralatan dan Mesin	23.984.923.949.031	26.134.914.404.283	2.149.990.455.252	9%
Gedung dan Bangunan	31.214.105.901.427	38.173.300.197.016	6.959.194.295.589	22%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.403.967.992.805	44.158.554.876.581	3.754.586.883.776	9%
Aset Tetap lainnya	1.676.564.224.112	1.627.233.353.138	- 49.330.870.974	-3%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.456.879.960.908	1.853.184.803.674	- 3.603.695.157.234	-66%

Sumber: Laporan Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
(Diolah oleh peneliti)

Jika dilihat lebih dekat, kenaikan aset tetap yang cukup besar yaitu 9% dan 22% sangat mempengaruhi pertumbuhan aset. Kenaikan aset tetap terbesar terjadi pada tanah dan bangunan yang masing-masing meningkat sebesar Rp25.793.756.061.351 dan Rp 6.959.194.295.589. Peningkatan paling signifikan pada tanah hingga 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.429.773.331.764, dengan pencapaian yang paling signifikan terlihat pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 yang mencapai Rp5.493.373.929.929 seperti keperluan: akuisisi tanah negara, hutan cadangan, taman, rumah susun, waduk dan saluran air, serta perluasan jalan raya Bekasi.

Puncaknya pada masa pandemi di tahun 2020 Aset Pemrov DKI Jakarta masih mengalami pertumbuhan walaupun dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi total aset pada tahun 2020 sebesar Rp520.360.899.906.272 dengan persentase kenaikan 1% dari tahun 2019 s.d 2020. Kondisi pada tahun 2021 cukup stabil mengalami

kenaikan pertumbuhan persentase 5% dengan total aset Rp544.504.580.984.676 dengan selisih Rp24.143.681.078.404 pada tahun 2020 s/d 2021.

2) Analisis Kewajiban

a) Rasio utang terhadap ekuitas

Tabel 4.6 Rasio utang terhadap ekuitas

Tahun	Total.Utang	Jumlah.Ekuitas	Rasio
2018	Rp6.458.589.188.882	Rp486.443.850.019.158	1,3%
2019	Rp10.582.694.275.107	Rp506.572.395.414.381	2,1%
2020	Rp15.107.695.822.217	Rp505.253.204.084.055	3,0%
2021	Rp19.975.312.518.107	Rp524.529.268.466.569	3,8%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Pada tahun 2018, rasio utang terhadap ekuitas tercatat sebesar 1,3%, yang merupakan persentase terendah dalam rentang waktu tersebut. Utang pada tahun 2018 lebih menitikberatkan pada utang jangka Panjang seperti utang kepada Pemerintah Pusat dalam proyek MRT yang sedang proses Pembangunan. Namun, pada tahun 2019, rasio ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 2,1%, berkontribusi pada pertumbuhan jumlah utang sebesar Rp10.582.694.275.107. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 mencapai Rp506.572.395.414.381. Selama tahun 2020 saat pandemi COVID-19, rasio kewajiban terhadap ekuitas mengalami kenaikan sebesar 3,0%.

Meskipun total utang pada tahun 2020 mencapai Rp15.107.695.822.217, terjadi penurunan jumlah ekuitas yang tidak signifikan, yakni Rp505.253.204.084.055. Akibatnya, perbedaan persentase rasio utang terhadap ekuitas antara tahun 2020 dan tahun sebelumnya adalah 0,9%. Tetap dalam konteks pandemi yang berlangsung, pada tahun 2021 kondisi total utang bertambah sebesar Rp19.975.312.518.107, terjadi peningkatan sebesar 3,8% dalam rasio kewajiban terhadap ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021.

b) Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Keterangan	Tahun anggaran (Dalam Jutaan Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
PAD	43.327.137	45.707.400	37.414.754	41.606.307
BD	15.209.573	11.698.390	13.647.958	19.396.961
DAU	-	-	-	-
BW	21.852.417	22.016.852	16.686.871	18.816.238
Pokok utang	33.629	33.629	33.629	33.629
Bunga	44.049	60.785	62.300.	86.116
Rasio DSCR	472	375	358	352

Data dalam tabel 4.7 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar kembali pinjaman mereka selama periode 2018 hingga 2021 tergolong baik. Hal ini dilihat dari rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang melebihi angka 2,5 dalam seluruh periode tersebut. DSCR adalah parameter penting dalam mengevaluasi kemampuan sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah provinsi, untuk membayar kembali utang jangka panjang.

Dalam periode tahun 2018, rasio DSCR yang lebih besar dari 2,5 menggambarkan bahwa penerimaan kas bersih (kas yang tersedia setelah memenuhi semua kewajiban pembayaran) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencakup lebih dari 2,5 kali dari kewajiban pembayaran utang jangka panjang. Kemampuan ini mencerminkan situasi keuangan yang kuat dan pengelolaan keuangan yang bijaksana.

c) Rasio *Debt to Income Ratio* (DIR)

Tabel 4.8 Rasio utang terhadap Pendapatan Daerah (DIR)

Tahun	Total Utang	Total Pendapatan	Rasio
2018	Rp6.458.589.188.882	Rp43.327.136.602.811	15%
2019	Rp10.582.694.275.107	Rp45.707.400.003.802	23%
2020	Rp15.107.695.822.217	Rp37.414.754.711.193	40%
2021	Rp19.975.312.518.107	Rp41.606.307.405.630	48%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Tabel tersebut menunjukkan perbandingan antara jumlah utang dan total pendapatan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2021. Rasio utang terhadap pendapatan daerah mengalami perubahan signifikan selama periode tersebut, mencerminkan sejauh mana utang provinsi terkait dengan pendapatan yang dihasilkan. Pada tahun 2018, rasio ini sebesar 15%, menunjukkan bahwa total utang mencapai 15% dari total pendapatan daerah, yang tergolong cukup baik. Namun, pada tahun 2019, rasio ini naik tajam menjadi 23%, yang dikategorikan baik, disebabkan oleh peningkatan jumlah utang sebesar

Rp10.582.694.275.107 dan kenaikan pendapatan daerah menjadi Rp45.707.400.003.802, mencerminkan potensi risiko yang lebih besar terhadap pembayaran utang.

Tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2020, mencapai 40%, yang juga masuk dalam kategori baik. Pada tahun ini, total utang naik menjadi Rp15.107.695.822.217, sementara pendapatan daerah turun menjadi Rp37.414.754.711.193, menunjukkan beban utang yang semakin besar dibandingkan dengan pendapatan. Di tahun 2021, rasio utang terhadap pendapatan daerah mencapai puncaknya sebesar 48%, yang termasuk kategori sangat buruk, dengan total utang bertambah menjadi Rp19.975.312.518.107 dan pendapatan daerah naik menjadi Rp41.606.307.405.630. Tingginya rasio ini mengindikasikan risiko yang lebih tinggi terhadap kemampuan membayar utang. Rasio ini menunjukkan kinerja pinjaman daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnyanya kepada kreditur eksternal.

3) Analisis Pendapatan

a) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.9 Rasio pertumbuhan PAD

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD		
2017	Rp43.901.488.807.743			
2018	Rp43.327.136.602.811	-1%	-	Rp574.352.204.932
2019	Rp45.707.400.003.802	5%		Rp2.380.263.400.991
2020	Rp37.414.754.711.193	-18%	-	Rp8.292.645.292.609
2021	Rp41.606.307.405.630	11%		Rp4.191.552.694.437

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Tabel tersebut menunjukkan perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari 2017 hingga 2021. Pada 2017, PAD mencapai Rp43.901.488.807.743. Tahun 2018, PAD turun 1% menjadi Rp43.327.136.602.811, disebabkan oleh faktor seperti fluktuasi penerimaan pajak dan dinamika ekonomi. Pada 2019, PAD meningkat 5% menjadi Rp45.707.400.003.802, didorong oleh peningkatan pendapatan dan administrasi yang lebih baik. Namun, pada 2020, PAD turun drastis 18% menjadi Rp37.414.754.711.193, akibat dampak pandemi COVID-19. Pada 2021, PAD kembali meningkat 11% menjadi Rp41.606.307.405.630, didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan efisiensi. Fluktuasi ini menggambarkan respons terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dan pelayanan publik.

b) Rasio Kemandirian

Tabel 4.10 Rasio Kemandirian Daerah

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Transfer	Rasio
2018	Rp43.327.136.602.811	Rp17.855.177.072.924	243%
2019	Rp45.707.400.003.802	Rp14.551.571.351.179	314%
2020	Rp37.414.754.711.193	Rp16.962.899.288.632	221%

2021 Rp41.606.307.405.630 Rp22.673.794.344.051 183%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Data dalam tabel LKPD Pemprov DKI Jakarta menunjukkan rasio kemandirian daerah dari 2018 hingga 2021, yang mengukur peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total pendapatan daerah. Pada 2018, rasio kemandirian mencapai 243%, menunjukkan kemandirian yang baik. Tahun 2019, rasio meningkat menjadi 314% karena pertumbuhan PAD yang lebih signifikan dibanding pendapatan transfer. Namun, pada 2020, rasio turun menjadi 221% karena penurunan PAD yang lebih besar.

Pada 2021, rasio kemandirian turun lagi menjadi 183% meskipun PAD meningkat, karena pertumbuhan pendapatan transfer yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah meliputi perubahan PAD, pendapatan transfer, dan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Secara keseluruhan, rasio kemandirian DKI Jakarta di atas 100% menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dan dominasi peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi internal.

c) Rasio Efektivitas

Tabel 4.11 Rasio Efektivitas

Tahun	Total PAD	Total Target Penerimaan PAD	Rasio
2018	Rp43.327.136.602.811	Rp44.350.077.858.844	98%
2019	Rp45.707.400.003.802	Rp50.845.081.891.466	90%
2020	Rp37.414.754.711.193	Rp38.085.985.616.631	98%
2021	Rp41.606.307.405.630	Rp45.182.087.250.967	92%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Data dalam tabel tersebut menunjukkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari 2018 hingga 2021, mengukur pencapaian target penerimaan yang ditetapkan. Pada 2018, rasio efektivitas mencapai 98%, menunjukkan pencapaian yang baik. Pada 2019, rasio turun menjadi 90% karena target yang lebih tinggi tidak tercapai. Tahun 2020, rasio kembali ke 98%, mendekati target penerimaan. Pada 2021, rasio turun lagi menjadi 92%, meskipun kinerja lebih baik dibanding 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio efektivitas meliputi perubahan PAD, target penerimaan, kebijakan pendapatan, dan fluktuasi ekonomi. Pola fluktuasi rasio efektivitas menunjukkan tantangan dalam mencapai target penerimaan, dan pemerintah daerah perlu menerapkan strategi untuk memaksimalkan pendapatan lokal. Rasio efektivitas LKPD Pemprov DKI Jakarta selama 2018-2021 termasuk dalam kategori cukup efektif, dengan rentang 90%-99%.

d) Rasio Efisiensi PAD

Tabel 4.12 Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Total Biaya Pemungutan PAD	Total PAD	Rasio
2018	61.063.848.818.057	43.327.136.602.811	141%

2019	64.099.287.469.013	45.707.400.003.802	140%
2020	51.716.860.929.662	37.414.754.711.193	138%
2021	61.231.460.250.253	41.606.307.405.630	147%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Data dalam tabel 4.12 menunjukkan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari 2018 hingga 2021. Rasio ini mengukur biaya pemungutan PAD dibandingkan dengan total pendapatan yang dihasilkan. Pada 2018, rasio efisiensi sebesar 141% menunjukkan biaya pemungutan lebih tinggi daripada pendapatan. Tahun 2019, rasio serupa sebesar 140%, dengan biaya pemungutan dan pendapatan meningkat.

Pada 2020, rasio efisiensi turun menjadi 138% meskipun pendapatan menurun. Pada 2021, rasio naik lagi menjadi 147%, menunjukkan biaya pemungutan tetap tinggi dibanding pendapatan. Rendahnya rasio efisiensi disebabkan oleh biaya tinggi dalam pemungutan PAD, seperti upah pegawai, pendidikan dan pelatihan, teknologi dan infrastruktur, serta pengawasan dan pengendalian. Peningkatan biaya tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding menyebabkan penurunan efisiensi.

4) Analisis Belanja

a) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Peneliti menghitung rasio efisiensi belanja menggunakan rumus berikut:

Tabel 4.13 Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Total Realisasi Belanja	Total Anggaran Belanja	Rasio
2018	Rp61.063.648.818.057	Rp74.729.343.748.013	82%
2019	Rp64.099.287.469.013	Rp77.010.363.876.861	83%
2020	Rp51.716.860.929.662	Rp58.579.713.267.668	88%
2021	Rp61.231.460.250.253	Rp69.605.015.911.264	88%

Sumber: diolah peneliti, LKPD 2018-2021

Data dalam tabel mengilustrasikan rasio efisiensi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 2018 hingga 2021. Rasio ini menilai sejauh mana pengeluaran daerah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pada 2018, rasio efisiensi belanja adalah 82%, menunjukkan realisasi belanja lebih rendah dari anggaran. Pada 2019, rasio tetap 83%, meskipun belanja meningkat.

Pada 2020 dan 2021, rasio efisiensi belanja naik menjadi 88%, namun realisasi belanja masih belum mencapai anggaran. Pengeluaran pada tahun-tahun ini meliputi berbagai pos seperti belanja jasa kantor, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga, termasuk alokasi untuk penanganan COVID-19. Rendahnya rasio efisiensi menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah untuk memastikan alokasi dana sesuai rencana dan meningkatkan efisiensi pengeluaran.

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Analisis tren pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rentang 2017-2021 mengungkapkan kenaikan yang berarti pada 2018 dan 2021 serta pertumbuhan yang lebih rendah pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun pandemi mempengaruhi 2020, total aset masih mengalami pertumbuhan 1%, menunjukkan ketahanan dalam pengelolaan aset. Aset tetap merupakan kontributor utama dalam total aset, khususnya dalam bentuk tanah.

Analisis rasio utang dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2021 menunjukkan variasi yang signifikan. Rasio utang terhadap ekuitas dan pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi kewajiban utang serta menghadapi fluktuasi pendapatan selama pandemi. Rasio DSCR di atas 2,5 menunjukkan kemampuan yang baik dalam membayar kembali utang jangka panjang.

Analisis rasio keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rentang 2018-2021 menggambarkan fluktuasi dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), dengan tahun 2019 dan 2021 mengalami pertumbuhan positif, sementara tahun 2020 mengalami penurunan. Rasio kemandirian daerah menunjukkan tingkat kemandirian yang baik, dengan pola hubungan delegatif. Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan variasi dalam pencapaian target penerimaan dan masuk kategori cukup efektif, sedangkan rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan fluktuasi biaya pemungutan dibanding pendapatan yang berhasil dihasilkan dan belum efisien. Perubahan dalam rasio-rasio ini mencerminkan tantangan dan potensi yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mengelola keuangan secara efisien dan efektif.

Analisis rasio efisiensi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 2018 hingga 2021 menunjukkan variasi antara 82% hingga 88%. Meskipun terjadi peningkatan realisasi belanja, anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai dan belum efisien. Faktor-faktor seperti pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan perencanaan yang tidak akurat mempengaruhi efisiensi belanja. Perbaikan diperlukan melalui alokasi anggaran yang lebih tepat dan efisien, perencanaan yang lebih akurat, dan pemantauan yang lebih ketat terhadap pengeluaran. Tujuan utama adalah meningkatkan pemanfaatan anggaran dan manfaat program bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Adhiantoko, H. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.

- Bisri, A., Laila Asyifa, N., Azhari, N., Kencana No, Jls., & Selatan -Banten, T. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta Sebelum Sesudah Pandemi Periode 2019 Dan 2020 Proceeding of Accounting Responsibility2022 ISSN (online) : XXXX-XXXX ISSN (print) : XXXX-XXXX © LPPM Universitas Pamulang (Vol. 01, Issue 1).* <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/par>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Putri, R. S. E. A. M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* https://peraturan.bpk.go.id/Download/126861/PP%20Nomor%2071%20Tahun%202010_satu%20file.pdf
- Vebiani, D., & Dian Hardiana, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). In *Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* (Vol. 1, Issue 1).